

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMA
SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Tri Ernawati
BP/NIM : 2008/00503
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Amar, B, M.S
NIP. 19571021 198603 1 001

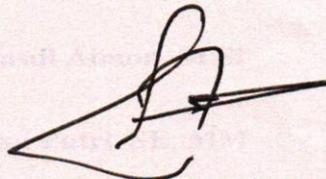
Pembimbing II



Muhammad Irfan, SE, M.Si
NIP. 19770409 200312 1 002

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Alianis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

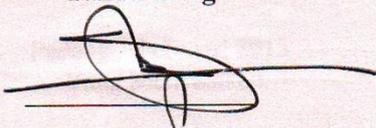
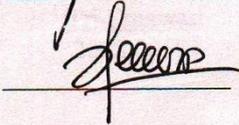
*Dinyatakan lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMA
SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Tri Ernawati
BP/NIM : 2008/00503
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2013

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. H. Syamsul Amar, B, M.S	
2. Sekretaris	: Muhammad Irfan, SE, M.Si	
3. Anggota	: Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si	
4. Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Ernawati
NIM/Thn Masuk : 00503/2008
Tempat/Tgl. Lahir : Talang Sari/16 Juli 1990
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih no:80B, Air Tawar Barat, Padang
No Telp/Hp : 085264537197
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran sendiri tanpa bantuan dari orang lain secara penuh melainkan arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat dari orang yang telah dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan.
4. Skripsi ini akan sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2013
Yang Menyatakan,



Tri Ernawati
2008.00503

ABSTRAK

Tri Ernawati 2008/00503 : Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B. M.S dan Bapak Muhammad Irfan, S. E, M. Si.

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan dasar adalah dengan program wajib belajar sembilan tahun. Namun dapat kita lihat rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2010 yaitu sebesar 8,48 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat tamat sekolah dasar atau mengalami putus sekolah di kelas 2 SMP. Ini berarti bahwa program wajib belajar Sembilan tahun belum terlaksana dengan baik di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: tingkat kemiskinan(X_1), beban ketergantungan (X_2) dan Tempat Tinggal (X_3).

Penelitian ini menggunakan metode pooling atau panel yaitu kombinasi 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 sampai 2010. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. (2) Beban ketergantungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. (3) Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan dan negatif terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat dengan besaran pengaruhnya 2,4641 persen. (4) Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan Tempat Tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat sumbangan secara bersama-sama sebesar 0,6716 persen.

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah untuk memperluas program-program pengentasan kemiskinan, meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum wanita, mendirikan sekolah berasrama dan pemberian bus sekolah. Dengan demikian lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi lama sekolah seperti biaya pendidikan pada berbagai tingkatan jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat ”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, M.S dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, M.S, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si, Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si, dan Ibu Dewi Zaini Putri SE, MM selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, M.S selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing selama belajar di Fakultas Ekonomi.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Special penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak (keluarga di Lunang) yang telah memberikan bantuan doa, moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2008.
11. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Februari 2013

Penulis

TRI ERNAWATI

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.	14
F. Manfaat Penelitian	15
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL	
DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Teori	16
1. Manfaat Pentingnya Pendidikan Bagi Pembangunan	16
2. Rata-Rata Lama Sekolah.....	21
a. Definisi Rata-Rata Lama Sekolah.....	
b. Teori Permintaan Pendidikan.....	22
3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pendidikan.....	26
a. Tingkat Kemiskinan.....	26
b. Beban Ketergantungan.....	29
c. Tempat tinggal.....	31

B. Temuan Penelitian Sejenis	34
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Variabel Penelitian	44
F. Definisi Operasional	44
G. Teknik Analisis Data	45
1. Analisis Deskriptif	45
2. Analisis Induktif	46
a. Uji Asumsi Klasik	46
1) Uji Multikolinearitas	46
2) Uji Heterokedastisitas	47
3) Uji Autokorelasi	47
b. Analisis Model Regresi	49
c. Koefisien Determinasi	49
d. Pengujian Hipotesis	50
1) Uji F	50
2) Uji Parsial	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	52
a. Keadaan Geografis Provinsi Sumatera Barat	52
b. Keadaan Penduduk Provinsi Sumatera Barat	53
2. Deskripsi Variabel Penelitian	54
a. Deskripsi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat	54
b. Deskripsi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	57

c. Deskripsi Beban Ketergantungan di Provinsi Sumatera Barat .	60
d. Deskripsi Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera barat	63
3. Analisis Induktif.....	65
a. Uji Asumsi Klasik.....	65
1.) Uji Multikolinearitas	65
2.) Uji Heterokedastisitas	66
3.) Uji Autokorelasi	67
b. Analisis Model Regresi	69
c. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²).....	61
d. Pengujian Hipotesis.....	71
1.) Uji F	71
2.) Uji Parsial.....	72
B. Pembahasan.....	73
1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Beban Ketergantungan dan Tempat Tinggal terhadap Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Bara.....	74
2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat.....	74
3. Pengaruh Beban Ketergantungan terhadap Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat.....	77
4. Pengaruh Tempat Tinggal terhadap Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat.....	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR REFERENSI	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007-2009	3
2. Data Lama Sekolah, Tingkat Kemiskinan dan Beban Ketergantungan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010	9
3. Penelitian Terdahulu	34
4. Klasifikasi Nilai d (D-W)	48
5. Perkembangan lama Sekolah (%) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010.....	55
6. Tingkat Kemiskinan (%) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010	59
7. Beban Ketergantungan (Orang) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 – 2010	61
8. Pengelompokkan di Provinsi Sumatera Barat Daerah Kabupaten dan Kota	64
9. Hasil Uji Multikolinearitas	65
10. Hasil Uji Heterokedastisitas	67
11. Hasil Uji Autokorelasi.....	68
12. Hasil Estimasi Model Regresi	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Pentingnya Pendidikan.....	20
2. Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah Sekolah di Provinsi Sumatera Barat.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Tabulasi Data Penelitian	89
2. Hasil Uji Multikolinearitas	93
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	96
4. Hasil Uji Autokorelasi.....	97
5. Hasil Uji Model Regresi Panel	98
6. Tabel Durbin-Watson	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam perkembangan sebuah masyarakat dan merupakan tujuan utama didalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui bidang pendidikan kemajuan dari suatu individu bahkan komunitas masyarakat tertentu dapat tercapai dengan baik. Dengan pendidikan itu pula mereka dapat menyerap dan mempergunakan Teknologi Modern untuk mengelola dan mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu melimpah dan menciptakan berbagai hal yang berguna untuk masyarakat. Hal ini terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu fungsi terpenting dalam pengembangan pribadi seseorang individu dan pengembangan pembangunan nasional.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu meningkatkan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula produktivitas kerja. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah mencapai peningkatan pendidikan.

Demikian pentingnya peranan pendidikan di Indonesia, telah dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hal i

ni telah diperkuat lagi pada pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat bahwasaya untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan baik laki-laki maupun perempuan, tidak memandang umur, wilayah dan status ekonomi.

Indonesia juga berkomitmen kuat terhadap pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) melalui tujuan yang kedua yaitu mencapai pendidikan Dasar untuk semua. Dimana Pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius terhadap pencapaian delapan tujuan MDGs atau tujuan pembangunan Millenium. Keseriusan itu diimplementasikan dengan mengintegrasikan dalam program-program daerah sesuai acuan program pembangunan nasional. Di harapkan tahun 2015 mendatang keseluruhan program MDGs itu bisa dicapai sesuai target, (Sumber: PadangEkpres.co.id).

Pendidikan merupakan landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula produktivitas kerja. Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non pasar (non ekonomi), namun secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Akan tetapi karena hampir keseluruhan jasa dan fasilitas dibidang pendidikan di berbagai negara berkembang disediakan oleh pemerintah,

maka faktor penentu disisi permintaan terhadap pendidikan menjadi jauh lebih penting daripada faktor-faktor penentu disisi penawarannya.

Dalam perspektif pemenuhan pemerataan pendidikan, target jumlah anggota masyarakat usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang dapat mengecap pendidikan adalah sebesar 80 persen. Sementara di Sumbar, persentase daftaran murid usia 16 – 18 tahun baru mencapai sekitar 40 persen (BPS, 2000). Hal ini mengindikasikan perlunya program perluasan sarana pendidikan, agar pemerataan pendidikan dapat dipenuhi, (Elfindri dan Bachtiar, 2004:66).

Tabel 1 :
Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007-2009

No	Provinsi	Tahun			Rangking		
		2007	2008	2009	2007	2008	2008
1	NAD	8,50	8,50	8,63	17	17	17
2	SUMUT	8,60	8,60	8,65	8	8	8
3	SUMBAR	8,18	8,26	8,45	9	9	9
4	RIAU	8,40	8,51	8,56	3	3	3
5	JAMBI	7,63	7,63	7,68	12	13	13
6	SUMSEL	7,60	7,60	7,66	13	12	10
7	BENGGKULU	8,00	8,00	8,23	11	11	12
8	LAMPUNG	7,30	7,30	7,49	20	20	21
9	BABEL	7,18	7,37	7,41	10	10	11
10	KEPRI	8,94	8,94	8,96	6	6	6
11	DKI JAKARTA	10,80	10,80	10,90	1	1	1
12	JOGJA	8,59	8,71	8,78	4	4	4
13	KALTENG	8,00	8,00	8,02	7	7	7
14	SULUT	8,80	8,80	8,82	2	2	2

Sumber : *SUSENAS tahun 2007-2009*

Pada tabel 1 dapat kita lihat, rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ketahun cukup mengalami peningkatan yang berarti bahkan merupakan peringkat ke sembilan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya Provinsi

Sumatera Barat masih tertinggal dari provinsi-provinsi tetangga misalkan provinsi Sumatera Utara dan Riau, dimana Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat delapan dan Provinsi Riau menduduki peringkat tiga dari provinsi- provinsi di Indonesia. Hal ini berarti di Provinsi Sumatera Barat masih tertinggal dengan Provinsi – Provinsi tetangga di Indonesia.

Laporan MDGs (UNDP, Bappenas 2010) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu faktor penting penyebab putus sekolah. Anak – anak dari rumah tangga miskin memiliki akses pendidikan yang rendah karena relatif besarnya biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung. Biaya pendidikan langsung contohnya adalah sumbangan pembangunan dan uang masuk sekolah, sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya beli buku serta biaya lain untuk keperluan sekolah. Pada saat yang bersamaan, putus sekolah merupakan gambaran dari tekanan bagi anak untuk memasuki pasar kerja. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Bahkan ada diantara mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor tempat tinggal. Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyebab kedua, keberadaan unit sekolah rata-rata baru pada wilayah kecamatan, sehingga aksesnya relatif jauh dari pemukiman penduduk dan membutuhkan biaya transportasi. Kondisi demikian, menyebabkan ketidakberdayaan secara ekonomi pada sebagian orang tua dari keluarga miskin, sehingga anaknya terpaksa meninggalkan atau

mengurungkan niat melanjutkan pendidikan. Realita yang terjadi di tengah sebagian masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) itu telah menjadi lingkaran masalah antara ekonomi dan pendidikan yang semuanya menyangkut pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Sumatera Barat yang dekat dengan tepian pantai. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Elfindri dkk (2006) di Propinsi Sumatera Barat menemukan bahwa daerah – daerah yang paling rawan dalam arti tingkat putus sekolah tertinggi berada pada tiga lokasi, yaitu daerah tepian pantai, perkebunan dan daerah pinggiran hutan. Daerah tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menyumbangkan kegagalan dalam pencapaian pemerataan pendidikan.

Selain biaya pendidikan, tingkat kemiskinan dan tempat tinggal, beban ketergantungan juga mempengaruhi pemerataan pendidikan. Permintaan atau hasrat suatu keluarga untuk mendapatkan sejumlah anak ditentukan oleh preferensi keluarga itu sendiri atas sejumlah anak yang dianggap bisa terus bertahan hidup. Bagi masyarakat miskin dipandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil yang baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sumber finansial orang tua usia lanjut.

Pertambahan penduduk yang sedemikian cepat menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya berbagai masalah

ekonomi, sosial dan psikologi yang semuanya itu melatarbelakangi kondisi keterbelakangan bagi masyarakat di Sumatera Barat.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik. Meningkatnya beban ketergantungan dapat mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Kondisi ini akan memperparah perekonomian masyarakat miskin, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan tidak terpenuhi karena pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Kebutuhan terhadap pendidikan tidak dapat terpenuhi sehingga menuntut anak dari keluarga miskin untuk putus sekolah. Bahkan tidak jarang dari mereka juga ikut membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah.

Investasi dibidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan investasi. Penetapan prioritas dari pilihan-pilihan kegiatan investasi dibidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nilai balik (*rate of return*) sering digunakan dalam menentukan prioritas investasi dibidang pendidikan karena memperhitungkan tingkat efisiensi kegiatan investasi tersebut. Dengan diketahuinya pengembalian pendidikan ini diharapkan dapat membantu menggerakkan program perluasan pemerataan pendidikan secara lebih tepat dan efisien.

Oleh karena itu Rancangan Pendidikan Jangka Menengah (RPJM) daerah Propinsi Sumatera Barat yang sudah disusun menjadi pedoman dan

rujukan bukan hanya oleh Pemerintah Propinsi, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sekiranya hal itu dapat diwujudkan dengan pola saling melengkapi berdasarkan kewenangan masing-masing maka peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator pemerataan akan dapat diwujudkan untuk tidak menanggung pembiayaan di bidang pendidikan, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota mulai tahun 2011 telah menyediakan beasiswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Provinsi Sumatera Barat sekitar 12 Milyar Rupiah dari APBD Propinsi, (Sumber:ri.padang.co.id).

Keberhasilan program pendidikan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar. Di samping kelengkapan prasarana pendidikan yang memadai, banyaknya kelas dan guru sangat menentukan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik, ([Sumber : BPS: 2010](#)).

Masalah ketidakberdayaan ekonomi sebagian masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) yang menyebabkan mereka masuk garis kemiskinan telah menimbulkan akses negatif di sektor pendidikan berupa ketidakmampuan biaya untuk mengikuti proses belajar. Indikator utama dari akses negatif itu adalah rendahnya angka partisipasi murni (APM) mengikuti pendidikan

tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang hanya 64 persen dan Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA) hanya 49 persen, (www.kompas.com).

Melihat fakta yang terjadi bahwa beragamnya pemerataan pendidikan yang terjadi di Sumatera Barat, maka disajikan data tentang rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan dan beban ketergantungan, pada tahun 2010 di provinsi Sumatera Barat pada tabel 2.

Tabel 2 memperlihatkan terdapat variasi yang tinggi pada tingkat pemerataan pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. Terlihat dalam angka rata-rata lama sekolah per kabupaten/ kota di Sumatera Barat. Rata-rata lama sekolah yang paling rendah terjadi di Kabupaten Mentawai yaitu sebesar 6,51 persen. Kemudian diiringi dengan angka terendah nomor dua yaitu terjadi pada Kabupaten Padang Pariaman dan Sawahlunto yaitu sebesar 7,26 persen pada Kabupaten Padang Pariaman dan 7,43 persen pada Kabupaten Sawahlunto. Tingkat rata-rata lama sekolah rendah menunjukkan kurangnya kualitas pendidikan sehingga terjadi kualitas sumber daya yang rendah di Kabupaten tersebut dan pemerataan atau kebijakan pemerintah setempat yang dilakukan kurang baik. Faktor penyebab keduanya kemungkinan oleh tingginya biaya pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula biaya pendidikannya sehingga keluarga miskin lebih cenderung mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2 :
Data Rata – Rata Lama Sekolah, Tingkat Kemiskinan, dan Beban
Ketergantungan Pada Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Kemiskinan (%)	Beban Ketergantungan (Orang)
1	Kab.Kepulauan Mentawai	6.51	19.74	69
2	Kab.Pesisir Selatan	7.84	10.22	62
3	Kab.Solok	7.60	11.74	64
4	Kab. Sijunjung	7.43	10.45	62
5	Kab. Tanah Datar	8.35	6.90	63
6	Kab. Padang Pariaman	7.26	11.86	70
7	Kab. Agam	8.50	9.84	67
8	Kab. Lima Puluh Kota	7.94	10.47	64
9	Kab. Pasaman	7.61	10.96	67
10	Kab. Solok Selatan	7.82	11.11	62
11	Kab. Dharmasraya	7.77	10.56	55
12	Kab. Pasaman Barat	8.00	9.59	66
13	Kota Padang	10.91	6.31	46
14	Kota Solok	10.43	6.99	55
15	Kota Sawahlunto	9.14	2.47	58
16	Kota Padang Panjang	10.23	7.60	59
17	Kota Bukittinggi	10.50	6.82	51
18	Kota Payakumbuh	9.66	11.58	59
19	Kota pariaman	9.90	5.90	62
	Sumatera barat	8.48	9.44	61

Sumber: BPS Sumatera barat 2010

Tabel 2 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2010 yaitu sebesar 8,48 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Sumatera Barat tamat sekolah dasar atau mengalami putus sekolah di kelas 2 SMP. Ini berarti bahwa program wajib belajar Sembilan tahun belum terlaksana dengan baik di Sumatera Barat. Jika diamati antar daerah kabupaten/kota, kualitas pendidikan juga masih tergolong rendah karena 11 dari 19 kabupaten/kota memiliki rata-rata lama sekolah di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sokok Selatan, Kabupaten Dharmasraya,

dan Kabupaten Pasaman Barat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Sumatera Barat belum berhasil meningkatkan pendidikan penduduknya.

Kota Padang memiliki penduduk dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi yaitu sebesar 10,91 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang tamatan SMP atau mengalami putus sekolah di kelas 1 SMA. Ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar Sembilan tahun telah terlaksana dengan baik di Kota Padang sehingga kualitas pendidikan juga tergolong baik. Hal ini mungkin disebabkan Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang mana hampir semua kegiatan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan dilakukan di Kota Padang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya tamat sekolah dasar atau mengalami putus sekolah di kelas 1 SMP. Ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kepulauan Mentawai belum baik dan wajib belajar Sembilan tahun belum tercapai. Hal ini mungkin disebabkan sarana dan prasarana pendidikan serta pendapatan penduduk yang rendah sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenyataan ini diduga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2 mendeskripsikan suatu kenyataan pada Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa tingkat kemiskinannya paling tinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,74 persen di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pada kenyataannya rata-rata lama sekolah juga tergolong rendah. Fakta ini kemungkinan dikarenakan oleh perhatian pemerintah yang kurang baik.

Pemerintah tidak memberikan bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan bersekolah. Pemerintah berharap BSM dapat membantu siswa dalam mencapai cita-citanya. Di sisi lain, disebabkan karena di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak terpisah dari pulau sumatera sehingga susah memperoleh kualitas yang baik dalam bidang pendidikan.

Tingkat kemiskinan yang terendah terdapat di Kota Sawahlunto, yaitu sebesar 2.47 persen. Fakta ini terjadi penduduk sekitar pada umumnya sudah memiliki penghasilan yang memadai sehingga sebagian penduduk sawahlunto berkehidupan cukup dan sejahtera sehingga tingkat kemiskinannya paling terendah di dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan tabel 2 bahwa beban ketergantungan di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunjukkan perbedaan yang tidak begitu tajam. Rata – rata beban ketergantungan di Kabupaten/kota Sumatera Barat sebesar 61 orang. Angka ini tergolong masih tinggi. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif menanggung 61 orang penduduk yang berusia tidak produktif. Hampir dua orang penduduk yang berusia produktif menanggung satu orang yang berusia tidak produktif. Kenyataan ini kemungkinan disebabkan komposisi penduduk yang setiap tahunnya meningkat.

Tabel 2 menggambarkan bahwa propinsi yang memiliki beban ketergantungan terendah adalah kota Padang sebesar 46 orang. Setiap 100

orang yang produktif menanggung 46 orang yang tidak produktif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penduduk kota padang didominasi oleh penduduk yang berusia produktif. Ini terbukti pada tahun 2010 tersebut jumlah penduduk yang berusia produktif adalah 570.716 jiwa, sementara jumlah penduduk secara keseluruhannya sebesar 833.562 jiwa. Lebih dari setengah jumlah penduduk kota Padang berusia produktif. Ini kemungkinan berarti mayoritas penduduknya di kota padang sudah bekerja.

Rendahnya beban ketergantungan di kota Padang kemungkinan dikarenakan oleh biaya oportunitas (*opportunity cost*) yang rendah. Biaya oportunitas berupa waktu sang ibu yang habis untuk memelihara anak sehingga ia tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang produktif. Pendapatan yang dapat diperoleh apabila sang ibu tidak memelihara anak-anaknya sehingga ia dapat memanfaatkan waktu untuk bekerja. Bekerjanya sang ibu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga tingkat kemiskinan juga berkurang.

Daerah yang memiliki beban ketergantungan terbesar adalah kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 70 orang. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran. Faktor geografis berupa jauhnya tempat tinggal dari layanan kesehatan (puskesmas) menyebabkan tingginya tingkat kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) belum terealisasi di kabupaten Padang Pariaman. Akses pelayanan kesehatan terutama ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) modern masih jauh dari tempat tinggal penduduk. Tradisi kaum wanita untuk menikah pada usia yang relatif

muda. Akibatnya jumlah pasangan yang menikah lebih banyak dan periode subur untuk memproduksi menjadi panjang sehingga tingkat kelahiran tinggi. Tingginya tingkat kelahiran akan menambah beban ketergantungan keluarga yang juga meningkatkan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk lebih jelasnya masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan yang meningkat.
2. Sosial budaya.
3. Beban ketergantungan yang masih tinggi.
4. Faktor geografis.
5. Biaya pendidikan yang tinggi.
6. Pendidikan orang tua yang masih rendah.
7. Kawin muda.
8. Jarak antara rumah ke sekolah sangat jauh.
9. Infrastruktur atau sarana pendidikan yang kurang lengkap
10. Motivasi belajar yang masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penulisan dan pembahasan lebih terarah kepada sasaran yang hendak dicapai, untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah dari

identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas. Pembatasan masalah dari variabel yang mempengaruhi lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat adalah tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Sejauhmana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh beban ketergantungan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh tempat tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui pengaruh beban ketergantungan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui pengaruh tempat tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi pembangunan dan Sumber Daya Manusia.
3. Sebagai masukan dan pedoman bagi pembuatan perencanaan pembangunan khususnya tentang kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya.
5. Masukan bagi pemerintah maupun lembaga – lembaga lain dalam mengambil kebijakan terutama mengenai masalah pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Manfaat Pentingnya Pendidikan Bagi Pembangunan

Investasi pendidikan diyakini sebagai salah satu proses pembentukan mutu modal manusia dan proses tersebut dapat diyakini sebagai tindakan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Elfindri, 2001:22). Oleh karena itu memberi perhatian kepada pendidikan sudah merupakan keharusan bagi kita untuk mengandalkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang (Widodo, 2000:130).

Keyakinan tersebut terbukti bahwa pengembalian individu dan sosial dari pendidikan bahkan melebihi tingkat pengembalian yang berasal dari investasi dalam bentuk lainnya (Elfindri, 2001:57). Pendidikan merupakan landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula produktivitas kerja (Simanjuntak, 1985:130-131).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai sebuah proses timbal balik dari pribadi-pribadi manusia dalam menyesuaikan diri dengan manusia lain dan alam semesta. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Sedangkan United Nations, *Report on the world Social Situation* (1997) menyatakan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi.

Payaman Simanjuntak (2000:69) menuturkan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan bukan hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktifitas kerja. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja atau penghasilan.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada manusia. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau fisik berupa gedung, jembatan dan

lain-lain. Padahal sukses atau tidaknya pembangunan fisik tersebut justru sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan manusianya. (Tirtarahardja, 2005:300).

Pendidikan sebagai upaya maksimal dan menyeluruh yang hasilnya tidak akan segera dapat dirasakan dan dilihat, ada proses yang panjang antara dimulainya usaha dengan ketercapaian hasil. Andil yang diberikan pendidikan pada pembangunan dipandang sebagai suatu kesatuan umum, maka pendidikan merupakan suatu komponen atau bagian dari pembangunan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sektor pendidikan memerankan peran yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktifitas ekonomi lainnya.

Koentjaraningrat menyatakan (dalam Yulhendri, 2009:117) bahwa membangun sistem pendidikan yang mapan dengan berorientasi pada keunggulan bersaing merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha menciptakan manusia siap memasuki zaman yang selalu berubah. Potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia bisa berpikir dan selalu belajar sebagai salah satu tugas kemanusiaannya.

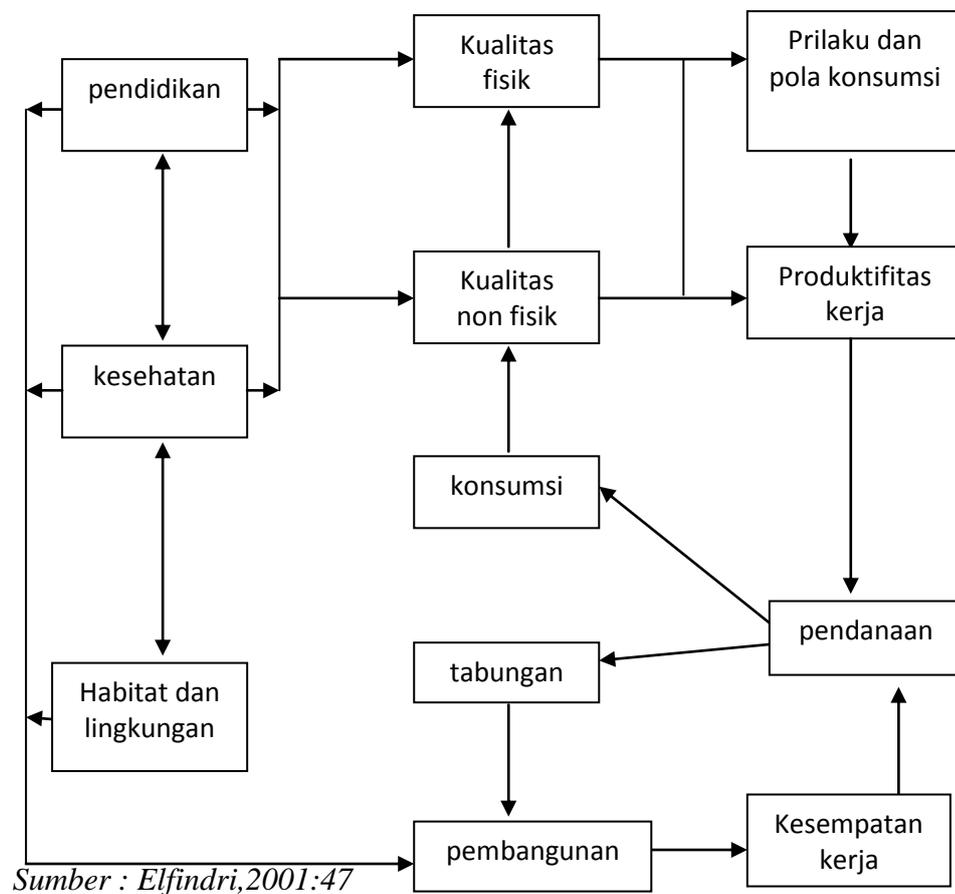
Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontiniu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan

sumber daya berkualitas untuk pembangunan. Pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia. Hasil pendidikan menunjang pembangunan.

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap satu tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Menurut Mark blaug (dalam Elfindri, 2001:41) bahwa tidak seharusnya kita memandang pengeluaran pendidikan sebagai kegiatan konsumsi, tetapi hampir mirip dengan penanaman modal atau sebagai investasi.

Penanaman modal dalam bentuk pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Jhingan, 2003:41)

Penanaman modal manusia dilakukan pada pendidikan formal yang dapat diperoleh oleh pelajar melalui berbagai jenjang pendidikan formal. Pendidikan merupakan hak warga negara seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dengan pendidikan masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomis bagi masing – masing individu dan manfaat sosial. Berikut ini dapat dilihat peranan pendidikan dalam bentuk gambar 1.



Gambar 1.
Peranan Pendidikan

Gambar 1 diatas menggambarkan bahwa segala sesuatu bersumber dari pendidikan. Antara pendidikan dan kesehatan saling mempengaruhi. Pendidikan sangat berperan dalam menciptakan kualitas fisik dan non fisik yang baik. Pembangunan suatu negara akan berhasil bila kualitas pendidikannya bagus. Kesempatan kerja pun diduduki oleh pekerja yang mempunyai skill yang relatif baik, Menurut Blaug (dalam Elfindri, 2001:20) bahwa tidak pernah ada pekerjaan dengan tuntutan skill yang relatif baik tanpa membutuhkan pendidikan. Manusia sesungguhnya modal yang aktif dalam pembangunan, peningkatan produktifitas dan *benefit*

modal manusia sangat ditentukan oleh keahlian dan pendidikan yang dimiliki oleh individu.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

a. Definisi Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengidentifikasi makin tingginya pendidikan formal yang di capai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang di jalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Teori Permintaan Pendidikan

Menurut Todaro (2000), bahwa dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni: (1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*) bagi siswa dan/atau keluarganya); serta (2) biaya-biaya sekolah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/atau keluarganya. Oleh karena tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa pendidikan, menyebabkan pemerintah semakin giat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

(Ismid Hadad, 2003 : 1) Dari sisi permintaan. Dua hal yang paling berpengaruh pada jumlah pendidikan yang diinginkan yaitu : Pertama: Harapan seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern pada masa yang akan datang, kedua biaya –biaya pendidikan baik yang langsung maupun tidak langsung yang harus di keluarkan seorang siswa.

Dengan demikian permintaan terhadap pendidikan merupakan permintaan yang tidak langsung (*derived demand*) terhadap kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern. (Michael P. Todaro: 335). Hal ini di sebabkan karena untuk memperoleh

pekerjaan di sektor modern tersebut lebih banyak di tentukan oleh pendidikan seseorang. Bagi sebagian besar masyarakat di negara berkembang (terutama golongan yang miskin) menginginkan pendidikan bukanlah karena alasan – alasan manfaat nonekonomi saja, melainkan lebih merupakan cara untuk mengamankan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern. Manfaat – manfaat yang tidak langsung inilah yang pada gilirannya harus dipertimbangkan dengan biaya sekolah yang harus dikeluarkan tersebut.

Menurut Todaro (2004:425-426) :

Lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh beberapa variabel sebagai berikut : perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan. Variabel lain yang sangat mempengaruhi tingkat permintaan pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan. Orang – orang karena kemiskinan tidak dapat melanjutkan pendidikan akan berada dalam golongan orang-orang putus sekolah atau tidak berpendidikan yang pada akhirnya sangat sulit mendapatkan bidang pekerjaan formal.

Dalam Elfindri (2001), bahwa dari sisi permintaan, yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni dengan relatif rendahnya proporsi anak yang tidak terdaftar sekolah karena alasan letak sekolah yang jauh dengan tempat tinggal dan tidak di terima di sekolah.

Semakin tidak menguntungkan suatu tingkat pendidikan untuk menjadi tempat persinggahan, justru semakin tinggi pula permintaan terhadap tingkat pendidikan tersebut sebagai prasyarat kepada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada pemerintah agar memperluas fasilitas pendidikan di segala tingkatan untuk memenuhi permintaan. Apabila pemerintah kurang cepat tanggap maka masyarakat mungkin akan berusaha sendiri misalnya, seperti terjadi dengan gerakan sekolah mandiri, dimana sekolah - sekolah menengah yang dsponsori oleh masyarakat dibangun di seluruh pelosok negeri dengan harapan pada masa yang akan datang pemeliharannya akan diambil alih oleh pemerintah.

Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan pendidikan. Faktor penentu dari sisi permintaan terhadap pendidikan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yaitu pertama, harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*) bagi siswa atau keluarganya. Kedua, biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya.

Sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang (terutama golongan yang miskin) menginginkan pendidikan bukan karena alasan-alasan atau manfaat yang bersifat nonekonomis (reputasi, gengsi, kepuasan batin) melainkan hanya sebagai suatu wahana dalam permintaan akan pendidikan bisa dipastikan semakin lama akan semakin meningkat. Penurunan kesempatan kerja bagi yang tidak berpendidikan mendorong setiap penduduk untuk melindungi posisi atau prospek hidupnya dengan cara menempuh pendidikan tingkat dasar hingga tamat, (Todaro, 2004:426).

Ada dua alasan ekonomi mendasar yang memaksa kita percaya bahwa sistem pendidikan di banyak negara berkembang pada dasarnya tidak memperhatikan aspek pemerataan (*equality*). *Pertama*, biaya pendidikan individu untuk menempuh sekolah dasar secara relatif jauh lebih tinggi bagi anak orang miskin daripada biaya yang harus dipikul oleh anak dari keluarga kaya. *Kedua*, manfaat yang diharapkan dari pendidikan sekolah dasar bagi anak – anak dari keluarga miskin justru lebih rendah. Dengan demikian adanya biaya yang lebih tinggi yang dibarengi dengan manfaat yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengembalian (*rate of return*) investasi pendidikan seorang anak dari keluarga miskin begitu terbatas sehingga kemungkinan besar ia akan mengalami putus sekolah pada awal tahun pendidikannya.

Jumlah saudara mewakili beban anggota rumah tangga (*Household Dependency*). Di perkirakan semakin tinggi anggota rumah tangga atau

jumlah saudara maka akibatnya semakin besar kemungkinan anak untuk Drop Out sekolah atau tidak bersekolah. Hal ini dapat di artikan bahwasanya Drop out sekolah berarti tidak adanya permintaan terhadap pendidikan pada jenjang sekolah tertentu.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah

a. Tingkat Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktifitas pembangunan dapat tercapai sehingga untuk meningkatkan kualitas hidup dimasa depan lebih baik.

Masyarakat Sumatera Barat terdiri dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Masing – masing keluarga berbeda latar belakang ekonominya. Ada keluarga yang latar belakang sosial ekonominya memadai, sehingga menyediakan fasilitas pendidikan juga memadai. Sebaliknya ada pula keluarga yang sosial ekonominya sangat rendah, sehingga tidak dapat memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, bahkan sekolah pun tidak. Rendahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup besar dan

merata hal ini menjadi semakin parah sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, harga-harga naik semakin tinggi sehingga daya beli masyarakat sangat kurang, termasuk kemampuan masyarakat membiayai pendidikan anak-anaknya.

Biaya sekolah terbagi atas dua yaitu biaya sekolah langsung dan biaya sekolah tidak langsung. Biaya sekolah langsung seperti pembayaran uang pembangunan. Biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, beli seragam dan biaya lainnya. Biaya sekolah tidak langsung yang tinggi merupakan halangan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pendidikan formal, sehingga mereka mengambil keputusan untuk berhenti untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Rumah tangga miskin masih mengalami kesulitan untuk membeli buku dan peralatan sekolah lainnya, termasuk membeli seragam sekolah. Wakil Menteri Pendidikan menyatakan bahwa delapan puluh persen banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transportasi atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah.

<http://Republika.co.id>

Disamping itu, tingginya biaya oportunitas tenaga kerja yang harus ditanggung keluarga miskin jika anaknya bersekolah. anak –

anak yang telah mencapai sekolah dasar umumnya diperlukan tenaganya di lahan pertanian keluarga atau sekedar membantu menjajakan dagangan. Bagi anak perempuan biasanya dijadikan pembantu dirumah dan yang lebih tua menjadi pengasuh bagi adik-adiknya. Jika waktu yang tersedia digunakan untuk bekerja (sehingga menghasilkan sejumlah pemasukan bagi keluarga) dan jika digunakan untuk bersekolah, maka pihak keluarga tentu saja menanggung kerugian yang disebut biaya oportunitas pendidikan (*opportunity cost education*). Kerugian akan muncul karena keluarga yang bersangkutan harus kehilangan input tenaga kerja berharga yang sangat diperlukan. Jika anak bersekolah, maka orang tua terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk mempekerjakan orang lain guna menggantikan si anak.

Akibatnya amat sulit diharapkan anak keluarga miskin setelah tamat SMP bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan tercipta keluarga miskin baru dan jumlahnya akan semakin meningkat. Keluarga miskin banyak terdapat pada daerah-daerah yang jauh dari keramaian. Upaya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok besar yang berada di tepi pantai, di pedalaman, daerah kumuh perkotaan membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan sumber belajar siswa. Kesemua kebutuhan unsur pendidikan itu mesti disediakan oleh pemerintah. Jika pemerintah

masih setengah hati mengalokasikan dana untuk itu, tetap saja akses pendidikan tidak bisa ditingkatkan termasuk tenaga kependidikan dan sumber belajar siswa.

b. Beban Ketergantungan

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi komposisi umur penduduk yang proporsi terbesarnya adalah penduduk usia muda dan usia tua. Hal ini mengakibatkan tingginya beban ketergantungan penduduk. Sumatera Barat masih menghadapi masalah tingginya rasio ketergantungan penduduk. Tingginya beban ketergantungan penduduk ini berarti pula besarnya penduduk yang memiliki kecenderungan yang lebih besar mengkonsumsi dari pada menghasilkan (produktif).

Beban ketergantungan merupakan jumlah tanggungan anggota rumah tangga yang bekerja terhadap anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Biasanya penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65+ tahun) digolongkan sebagai masyarakat yang hidupnya ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif. Mereka adalah anggota masyarakat yang tidak produktif karena itu harus dibantu secara ekonomis (*financial*) oleh masyarakat yang produktif. Dalam (Todaro:299), Jika ditulis secara matematis rumusnya adalah:

$$DR = \frac{D1+D2}{D3} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

DR = *Dependency Ratio* (Beban Ketergantungan)

D1 = jumlah masyarakat yang berusia 0-14 tahun

D2 = jumlah masyarakat yang berusia 65 tahun keatas

D3 = jumlah masyarakat yang berusia 15-64 tahun/produktif

Pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang produktif akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak, terutama untuk konsumsi pangan. Selain itu dibutuhkan pula pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan kualitas anak melalui pengeluaran untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Agustina (dalam Irfan, 1999:26) menyatakan bahwa tingginya beban ketergantungan dapat pula disebabkan oleh semakin menurunnya angka kematian terutama angka kematian bayi dan penduduk usia muda yang berpengaruh pada semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Peningkatan jumlah penduduk usia lanjut dapat mengakibatkan terjadi pergeseran struktur umur penduduk dari penduduk yang berstruktur umur muda ke struktur umur tua. Hal ini akan menambah beban ketergantungan penduduk tua dalam suatu negara atau rumah tangga.

Menurut Elfindri (2001:100 dan 106) bahwa semakin besar jumlah saudara (anggota rumah tangga), maka semakin besar pula anak untuk tidak melanjutkan pendidikan sekolah. Terutama anak

perempuan. Besarnya beban ketergantungan dapat ditandai pula oleh besarnya jumlah anggota rumah tangga. Banyaknya anggota rumah tangga akan semakin memperbesar beban ketergantungan apabila struktur umur penduduk dalam rumah tangga didominasi oleh penduduk yang non-produktif. Beban ketergantungan sebagai jumlah tanggungan penduduk yang produktif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif.

Pada kondisi negara atau rumah tangga yang berpendapatan rendah, maka jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk investasi anak berupa pendidikan relatif rendah. Kelley (dalam Irfan, 1999:32) menemukan bahwa besarnya anggota rumah tangga mempengaruhi komposisi penduduk dalam rumah tangga yang akan berimplikasi pada investasi pendidikan.

c. Tempat Tinggal

Tempat Tinggal yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Sumatera Barat tersebar di berbagai wilayah yang cukup luas. Tersebar nya wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagian masih hidup secara kelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Keadaan seperti ini merintangi tersebar luasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok

masyarakat yang banyak anak – anaknya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Masalah ini bukan karena anak tidak mau sekolah, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik.

Lebowitz (dalam Elfindri, 2009:4) memuat review penelitian yang mengkaji kenapa terjadinya permintaan terhadap pelayanan pendidikan. Faktor utama berasal dari ketersediaan pelayanan, jarak, kondisi rumah tangga, serta kondisi anak, termasuk budaya. Jarak tempuh dapat semakin mengurangi probabilitas anak untuk mengesampingkan pendidikan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan (Elfindri dkk, 2006) dan Kabupaten Agam (Elfindri dkk, 2006) menemukan indikasi bahwa daerah-daerah yang permintaan pendidikan nya terendah berada pada 3 lokasi, yaitu daerah tepian pantai, daerah perkebunan, dan daerah pinggiran hutan.

Wilayah Sumatera Barat yang luas menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pendidikan. Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera merupakan topografi yang berbukit dan dekat dengan tepian pantai. Daerah yang berbukit menyebabkan infrastruktur yang tersedia untuk sekolah sangat terbatas. Salah satunya adalah transportasi ke sekolah yang susah

ditemui sehingga siswa menghadapi kesulitan untuk pergi bersekolah. Selain itu letak sekolah yang jauh dari rumah juga merupakan tantangan bagi siswa untuk bersekolah.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 2: Penelitian terdahulu

NO	PENULIS, JUDUL DAN TAHUN TERBIT	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Sesmiati Skripsi “Faktor-faktor yang mempengaruhi Drop Out di Kenagarian Batu Plano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam”. 2009	<ul style="list-style-type: none"> a. Y (Drop Out) b. X₁ (tingkat pendidikan orang tua) c. X₂ (jumlah tanggungan keluarga / .beban ketergantungan) d. X₃ (pekerjaan orang tua) e. X₄ (pendapatan orang tua) f. X₅ (biaya pendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat DO di kenagarian Batu plano. b. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu plano. c. Jenis pekerjaan orang tua tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano. d. Pendapatan orang tua berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano. e. Biaya pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat DO di kenagarian Batu Plano.
2	Izzaty. Jurnal.”Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak jenjang SMP dan SMA di Sumatera Barat”.2009.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kelamin b. Pendidikan orang tua c. Ibu bekerja d. Jenis Kelamin kepala rumah tangga e. Lapangan pekerjaan bapak f. status pekerjaan bapak g. jenis pekerjaan bapak h. pengeluaran rumah tangga i. kepemilikan rumah tangga j. Area k. Higly Dependency Ratio l. Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak SMP di Sumbar adalah jenis kelamin, pendidikan orang tua (ibu dan bapak), sektor pekerjaan bapak, dan kemiskinan. Sedangkan untuk SMA adalah jenis kelamin, pendidikan orang tua (ibu dan bapak), sektor pekerjaan bapak, kemiskinan, daerah tempat tinggal, jenis perkerasan jalan, ibu bekerja, biaya pendidikan, dan penghasilan utama penduduk. b. Anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki kecenderungan untuk tidak bersekolah sebesar 6,23% dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluargatidak miskin. Rumah tangga miskin biasanya lebih rentan dalam

		<p>m. Infrastruktur (sekolah dan jalan), dan</p> <p>n. Penghasilan utama penduduk</p>	<p>menghadapi krisis sehingga biasanya anak ikut bekerja membantu orang tua</p> <p>c. Daerah tempat tinggal juga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah, karena penduduk perkotaan lebih banyak bersekolah SMA sebesar 6,24% dibandingkan dengan penduduk pedesaan, fasilitas layanan pendidikan menengah yang belum merata merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini, sehingga untuk bersekolah mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapai sekolah SMA terdekat.</p> <p>d. Biaya pendidikan berpengaruh positif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh data di Susenas kor 2005 tidak memberikan rincian penggunaan biaya.</p> <p>e. Sektor pekerjaan bapak berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah anak. Bapak yang bekerja di sektor pertanian akan menurunkan partisipasi sekolah anak sebesar 3,66 % jika dibandingkan dengan sektor pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan, sebagian bapak yang bekerja disektor pertanian tinggal di Daerah pedesaan dan berpendidikan rendah.</p> <p>f. Ibu yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Persentase partisipasi anak bersekolah memiliki kecenderungan lebih rendah sebesar 7, 63 % bila dibandingkan dengan partisipasi anak bersekolah jika ibu tidak bekerja.</p> <p>g. Variabel yang tidak berpengaruh adalah jumlah sekolah, Highly Dependency Ratio, jenis pekerjaan bapak, Pendapatan perkapita rumah tangga, kepemilikan rumah, jumlah sekolah dan jarak sekolah.</p>
--	--	---	---

3	<p>Yulia anas, SE, M.Si dan Prof. Elfindri. Jurnal“strategi penuntasan wajib belajar 9 tahun pada level rumah tangga di Kabupaten pasaman (implikasi terhadap pencapaian MDGs)”. 2009</p>	<p>a. Biaya pendidikan b. Motivasi untuk sekolah c. Jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal</p>	<p>a. Di daerah perkebunan, permasalahan anak putus sekolah adalah karena, 1) 63,6 % rumah tangga kesulitan membiayai pendidikan anak karena faktor kemiskinan, 2) 53 % tidak adanya motivasi sekolah, baik motivasi orang tua maupun anak, 3) 25,8 % karena bekerja sebagai pekerja keluarga.</p> <p>b. Penyebab utama anak putus sekolah di daerah tepian hutan adalah 1) 75% karena rumah tangga mempunyai kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya. 2) 42,9% karena tidak adanya motivasi untuk sekolah. 3) 26,8% karena jarak ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal.</p> <p>c. Di daerah tepian pantai ditemukan bahwa 1) 55 % alasan putus sekolah karena tidak adanya motivasi anak untuk sekolah dan perhatian orang tua yang rendah terhadap kelangsungan pendidikan anak, 2) 50,0 % karena rumah tangga tidak memandang pendidikan sebagai hal yang penting bagi anak dan hanya menganggarkan 3,45 % dari total pengeluaran untuk biaya pendidikan anak per bulan, 3) 41,7% karena pengaruh lingkungan seperti banyaknya anak yang tidak sekolah dilingkungan tempat tinggal.</p>

Berdasarkan tabel 3, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penulis dalam pemilihan variabel dan indikatornya. Pertama, variabel terikat pada salah satu penelitian terdahulu menggunakan indikator partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah memiliki kekurangan yaitu tidak relevan digunakan, untuk itu penulis menggunakan indikator tingkat permintaan pendidikan.

Perbedaan Skripsi yang penulis tulis dengan penelitian sejenis terdahulu merupakan, penulis lebih menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat, di samping itu tahun data dan tempat penelitian yang di lakukan penulis berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penelitianterdahulu.

Penulis menggunakan data sekunder yang berorientasi Sumatera Barat karena keterbatasan data apabila penulis meneliti Sumatera Barat berorientasi rumah tangga. Penulis meneliti secara makro. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal.

C. Kerangka Konseptual

Di maksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan keterkaitan antara variabel-variabel yang akan di teliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang di teliti, berpijak pada teori yang di kemukakan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu pada tabel 2 diatas, maka variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tingkat kemiskinan, beban

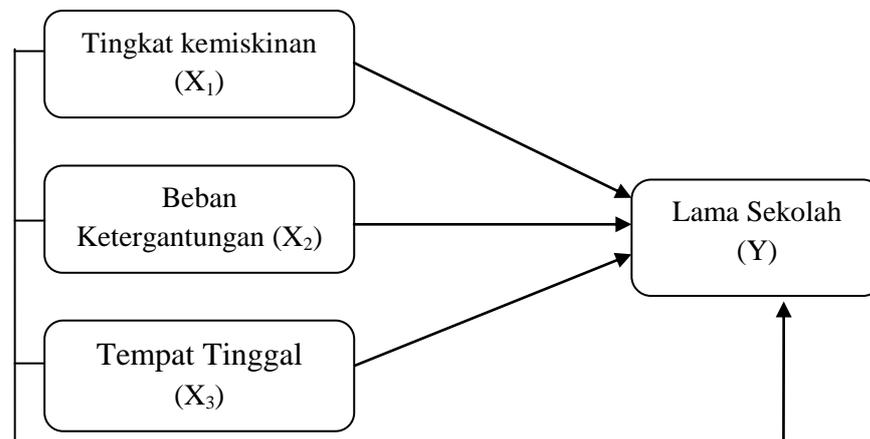
ketergantungan dan tempat tinggal. Variabel kemiskinan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2004) dan penelitian yang dilakukan oleh Izzaty (2009) bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap pemerataan pendidikan. Seseorang yang dikatakan miskin akan memiliki pendapatan yang rendah. Apabila suatu daerah pemerataan pendidikannya yang kurang baik maka secara langsung kemiskinannya juga akan tinggi. Disamping itu Yulia anas, SE, M.Si dan Prof. Elfindri (2009) menggunakan biaya pendidikan sebagai variabel bebas. Variabel kemiskinan yang digunakan penulis telah dimodifikasi dari penelitian terdahulu. Indikator yang digunakan adalah tingkat kemiskinan.

Variabel kedua adalah beban ketergantungan (*dependency ratio*). Dimana apabila dalam suatu keluarga jumlah saudaranya banyak maka secara otomatis keinginan untuk meenyekolahkan anak-anaknya akan berkurang hal ini bisa disebabkan tingginya biaya sekolah yang di tanggung oleh keluarga karena besarnya jumlah saudara. Berdasarkan teori dari Todaro (2004) dan Elfindri (2001) serta penelitian yang dilakukan oleh Sesmiati Skripsi “Faktor-faktor yang mempengaruhi Drop Out di Kenagarian Batu Plano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam”. 2009, bahwa semakin besar jumlah saudara (anggota rumah tangga) atau Higly Dependency Ratio, maka semakin besar pula anak untuk tidak melanjutkan sekolah, terutama anak perempuan. Dalam penelitian terdahulu beban ketergantungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzaty(2009), bahwa hasil penelitiannya Highly Dependency

Ratio tidak berpengaruh terhadap partisipasi sekolah anak jenjang SMP dan SMA di Sumatera Barat. Variabel kedua ini juga hasil modifikasi dari penelitian terdahulu.

Variabel ketiga adalah tempat tinggal. Variabel tempat tinggal yang dipakai oleh peneliti merupakan variabel *dummy*. Penulis memberikan variabel dummy di Provinsi Sumatera Barat bagian kabupaten dengan nilai 1, sedangkan variabel dummy bagian perkotaan dengan nilai 0. Berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Izzaty (2009) dia melihat, Daerah tempat tinggal juga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah, karena penduduk perkotaan lebih banyak bersekolah SMA sebesar 6,24% dibandingkan dengan penduduk pedesaan, fasilitas layanan pendidikan menengah yang belum merata merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini, sehingga untuk bersekolah mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapai sekolah SMA terdekat, dan penelitian yang dilakukan oleh Yulia anas, SE, M.Si dan Prof. Elfindri. Jurnal “strategi penuntasan wajib belajar 9 tahun pada level rumah tangga di Kabupaten pasaman (implikasi terhadap pencapaian MDGs)”. 2009 . Mereka melihat dalam penelitiannya adalah jarak tempuh ke sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Penulis memodifikasi variabel tempat tinggal sebagai variabel *dummy*.

Sebagaimana telah di kemukakan Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.

Kerangka Konseptual Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel. Maka hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$$

2. Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

3. Beban Ketergantungan mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

4. Tempat tinggal mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat artinya besar kecilnya nilai tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tidak ditentukan oleh tingkat kemiskinan.
2. Beban ketergantungan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. artinya besar kecilnya nilai tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tidak ditentukan oleh beban ketergantungan.
3. Artinya Variabel tempat tinggal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, besar kecilnya tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat ditentukan oleh faktor tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Pada Sumatera Barat daerah Kabupaten lebih sedikit lama sekolahnya dari pada Provinsi Sumatera Barat daerah perkotaan. Jauhnya jarak tempuh antara rumah ke sekolah dikarenakan wilayah yang tidak efisien.
4. Tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera barat. Hal ini mengindikasikan bahwa

tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal berpengaruh positif terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat.

B. SARAN

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Tidak berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pesat dalam pelayanan pendidikan. Berbagai program-program pemerintah bagi rumah tangga miskin telah membantu dalam meningkatkan lama sekolah. Seperti bantuan transportasi untuk siswa dalam komponen BOS, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) maupun program-program lain. Namun demikian pemerintah perlu juga melakukan perluasan program penekanan tingkat kemiskinan. Seperti memperluas pemberian Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini hanya menjangkau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Tidak signifikannya pengaruh beban ketergantungan terhadap tingkat lama sekolah disebabkan oleh : Pertama, penduduk Sumatera Barat tidak seluruhnya berada dalam golongan tidak mampu, masih banyak penduduk Sumatera Barat berada dalam golongan mampu sehingga sebarangpun besar tanggungan keluarga mereka tetap sanggup untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Kedua, budaya Masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) yang memposisikan atau menghargai pentingnya pendidikan.

Meskipun beban tanggungan keluarganya banyak, masyarakat Minangkabau memiliki motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya, guna untuk memperbaiki nasib keluarganya yang d bantu oleh keluarga luasnya, Walaupun tidak berpengaruhnya variabel beban ketergantungan terhadap lama sekolah pemerintah harus tetap mengalakkan program Keluarga Berencana (KB). Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan berbagai usaha nyata untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi kaum wanita. Maka akan tercipta kondisi-kondisi positif yang mendorong kaum wanita menjarangkan kehamilan dan menunda perkawinan. Penurunan tingkat fertilitas tersebut adalah peningkatan taraf pendidikan wanita yang diikuti oleh penciptaan kesempatan kerja bagi kaum wanita agar mereka bisa bekerja sendiri di luar rumah. Kesempatan untuk memperoleh pendapatan sendiri ini akan mendorong kaum wanita muda untuk menunda perkawinan mereka. Secara ekonomi mereka sudah dapat berdiri sendiri sehingga mempunyai posisi yang lebih baik dalam mencari pasangan dan merencanakan perkawinan serta kehidupan rumah tangganya.

3. Sangat terpercarnya keberadaan anak-anak usia sekolah yang harus dilayani, terutama yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kendala tempat tinggal dan transportasi. Seperti di Provinsi Sumatera Barat daerah Kabupten dapat diatasi dengan upaya perluasan aksesibilitas. (1) Pemerintah dapat menambah jumlah sekolah dengan jumlah kelas yang tidak banyak sehingga anak – anak dapat bersekolah tanpa terkendala oleh

jarak yang jauh antara rumah dan sekolah. (2) Pemerintah dapat mendirikan sekolah berasrama sehingga anak-anak tidak lagi terkendala oleh faktor tempat tinggal (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk transportasi siswa seperti memberikan bus sekolah yang biaya perawatan dan BBMnya subsidi dari pemerintah. Dengan demikian tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat dapat meningkat terutama di Provinsi Sumatera barat daerah kabupaten.

4. Tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang telah penulis teliti, karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Maka, disarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji dan meneliti faktor-faktor lain seperti biaya pendidikan dan pendidikan orang tua yang ada di luar variabel bebas penulis teliti sehingga akan dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga
- Anas, Yulia dan Elfindri. 2009. *Jurnal Strategi Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Level Rumah Tangga di Kabupaten Pasaman*. 14 September 2011
- Ananta, Aris.1990.*Ekonomi Sumber Daya Manusia*.FE UI;Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat dalam Angka 2008*. Padang : BPS
_____. *Sumatera Barat dalam Angka 2009*. Padang : BPS
_____. *Sumatera Barat dalam Angka 2010*. Padang : BPS
_____. *Proyeksi Penduduk Sumatera Barat menurut Umur*. Padang: BPS
- Denim, Sudarwan. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka setia
- Departemen pendidikan nasional. 2005. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional*. (<http://www.depdiknas.go.id>). 12 januari 2011
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang : Universitas Andalas
- Jhingan. 2002. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo
- Mankiw gregory n. 2000. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga.
- Mutia. Desember 2010. *80 Persen anak Indonesia Putus Sekolah karena Ekonomi*. (<http://www.Republika.co.id>). Mei 2011
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta : FE UGM
- Santoso, Djoko dan dkk. 2011. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Ilmu Ekonomi dalam Menghadapi Globalisasi*. Padang : UNP Press
- Simanjuntak, Payaman. 2000. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Sukirno, Sadono.1995.*Pengantar Teori Makro Ekonomi*:Edisi Kedua PT. Raja
- Sanjoyo. 2009. *Panel Data dengan Eviews*. ([www.blog forum](http://www.blogforum.com) diskusi ekonometrika.com).
November 2011
- Sesmiati. 2009. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Drop Out di Kenagarian Batu Plano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam*. Skripsi UNP
- Santoso, Djoko dan dkk. 2011. *Prosiding Seminar Nasional Pemngembangan Ilmu Ekonomi dalam Menghadapi Globalisasi*. Padang : UNP Press
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga
- Widiaastuti, Ari. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Winarno, Wing. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EVIEWS* Edisi kedua. Yogyakarta : UPP SIIM YKPN